



Kadin Pantau Proyek Pemkot

UMBULHARJO -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akan melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Yogyakarta untuk memantau pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot. Pelibatan Kadin akan diformalkan dalam waktu 1 - 2 bulan ke depan.

Walikota Yogyakarta H Herry Zudianto di Balaikota Timoho, Selasa (1/2), mengemukakan Kadin akan masuk sebagai forum pemantau dengan fungsi utama untuk pembantuan teknik.

Selain menjadi wadah pemantauan, forum tersebut juga akan menjadi ajang dialog untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, mulai dari pelelangan sampai pelaksanaan dan penyerahan.

"Saya ingin Kadin bisa ikut memantau, kita bisa konsultasi kalau ada masalah. Saya *nggak* bicara itu tahun

depan, tapi dalam bulan ini," ujarnya.

Forum independen

Terpisah, Didik Nur Dewanto, Ketua Bidang Usaha Kecil dan Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Yogyakarta menyatakan Kadin siap berkolaborasi dengan Pemkot dalam pemantauan pengadaan barang dan jasa.

Kerja sama diwadahi dalam forum independen untuk memantau pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot, termasuk pelaksanaan proyek-proyek Pemkot oleh pihak ketiga.

Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, Edi Muhammad, dalam pemaparan rencana umum pengadaan barang dan jasa SKPD Pemkot di Ruang Pertemuan Utama Atas Balaikota Timoho, mengutarakan pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan 34 SKPD Pemkot pada tahun ini senilai Rp148,13 miliar.

Aplikasi LPSE

Dijelaskan, jumlah pekerjaan sebanyak 1.635 paket dari 412 kegiatan. Terdiri dari jasa konstruksi 200 paket, jasa konsultasi 131 paket, jasa lain 870 paket, dan pengadaan barang sebanyak 634 paket.

"Pengadaan barang dan jasa di atas 100 juta menggunakan aplikasi LPSE. Untuk jasa konsultan di atas 50 juta juga dengan LPSE. Sedang yang nilainya sampai dengan 100 juta dilaksanakan masing-masing SKPD unit kerja," terang dia.

Ditambahkan, pelelangan sebanyak 155 paket pengadaan dan pekerjaan pada 2011 ini dilakukan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) menggunakan aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). "Penyedia barang dan jasa yang belum registrasi ke LPSE, segera saja mendaftar tanpa dipungut biaya," pungkasnya. (fir)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Pengendalian Pembanguna	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005